

**PENEGRAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGEBOOMAN IKAN  
DI KABUPATEN FLORES TIMUR PADA PASAL 85 DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERIKANAN**

**SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana hukum

**OLEH**

**AGUSTINUS AGI TUKAN**  
**NIM: 2017111045**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2023**

## LEMBARAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBOMAN IKAN  
DI KABUPATEN FLORES TIMUR PADA PASAL 85 DITINJAU DARI  
UNDANG – UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

### SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

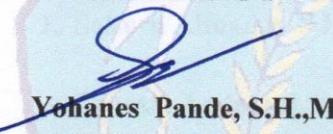
AGUSTINUS AGI TUKAN

NIM: 2017111045

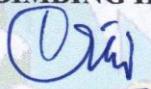
PROGRAM STUDY ILMU HUKUM

DISETUJUI

PEMBIMBING I

  
Yohanes Pande, S.H.,M.H.  
NIDN: 080 7127 403

PEMBIMBING II

  
Christina Bagenda, S.H.,M.H.  
NIDN: 082 303 6701

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES

  
Yohanes Pande, S.H.,M.H.  
NIDN: 080 7127 403

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM

  
Christina Bagenda,S.H.,M.H.  
NIDN: 082 303 6701

## LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBOMAN IKAN DI  
KABUPATEN FLORES TIMUR PADA PASAL 85 DITINJAU DARI  
UNDANG – UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

### SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

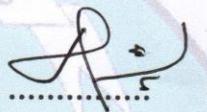
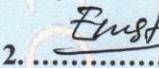
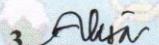
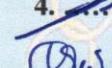
AGUSTINUS AGI TUKAN

NIM: 2017111045

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- |                                    |              |  |
|------------------------------------|--------------|--|
| 1. Sakura Alfonsus, S.H.,M.H.      | (Ketua)      | 1. ....<br>  |
| 2. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.H.    | (Sekertaris) | 2. ....<br> |
| 3. M.A.Liza Quintarti, S.H.,M.Hum. | (Anggota)    | 3. ....<br> |
| 4. Yohanes Pande, S.H.,M.H.        | (Anggota)    | 4. ....<br> |
| 5. Christina Bagenda, S.H.,M.H.    | (Anggota)    | 5. ....<br> |

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES



Yohanes Pande, S.H.,M.H.  
NIDN: 080 7127 403

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM



Christina Bagenda, S.H.,M.H.  
NIDN: 082 303 6701

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustinus Agi Tukan

Nim : 2017111045

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini sya buat dengan sebenar – benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Nim : 2017111045**

## **MOTO**

**“Pelestarian Dan Keindahan Biota Laut Menjadi Kekayaan  
Bangsa Indonesia”**

**(Agustinus Agi Tukan)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibu tercinta Titus Bao Tukan dan Maria Peni Goran (Alm) yang telah melahirkan dan membesarkan saya dan telah mendukung saya hingga proses akhir dalam penyelesaian karya tulis ini.
2. Kakak, adik sya (kakak Adrianus Laka Belek Tukan, kakak Julius Boli Tukan, kakak Martinus Tome Tukan, dan adik Khatarina Clara Anu Tukan). yang sudah membantu saya baik secara materil maupun motivasi yang menjadi pendukung untuk saya selama proses perkuliahan sampai dengan penyelesaian karya tulis ini.
3. Teman – teman saya ( Rino, Vandrio, Jhosua, Veki, Roken, Horten, Novi, Rian). Yang selalu memberi dukungan untuk saya selama menyelesaikan karya tulis ini.
4. Lembaga Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat saya menimba ilmu dan pengetahuan.
5. Almamater tercinta Universitas Flores.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“ Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan Di Kabupaten Flores Timur Pada Pasal 85 Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ”.**

Skripsi ini merupakan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Flores. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Dr.Simon Sirah Padji,MA. Universitas Flores dan Ana Maria Gadi Djou, SH,M.Hum Wakil Rektor yang dengan bijaksana memimpin lembaga pendidikan Universitas Flores.
2. Dekan Yohanes Pande, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Bernadus Bada Kelen S.H, M.Hum Wakil Dekan yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat Fakultas
3. .Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Dimas Yusuf F.R,S.Tr.K, S.I.K selaku kepala kantor Sub Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan seluruh staf yang sudah membantu penulis dengan memberi informasi selama penulis melakukan penelitian di kantor Sub Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
6. Rekan – rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran mulai peneliti melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini

Peneliti yakin bahwa semua kebaikan yang telah peneliti dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.

Ende, 25 Juni 2023

Penulis

## **ABSTRAK**

### **Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan Di Kabupaten Flores Timur Pada Pasal 85 Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**

**Oleh: Agustinus Agi Tukan, Nim: 2017111045**

---

Tindakan pengawasan yang jarang dilakukan oleh Kepolisian Larantuka secara langsung disebabkan karena jumlah Petugas Kepolisian Larantuka sampai pada bulan Oktober tahun 2014 berjumlah 412 orang belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur sebanyak 241.082 jiwa serta luas wilayah 5.983,38 km (daratan 1.812,85 km dan lautan 4.170,53 km). terbatasnya jumlah petugas Kepolisian yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan, tentunya sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum khusus tersebut. Rumusan masalahnya adalah: (1). Bagaimanakah Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemboman Ikan Di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?. (2). Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi pelaku pengeboman ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka, ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?

Tujuan dari penelitian ini yakni ingin menelaah atau mengkaji Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemboman Ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka di tinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Untuk mengetahui Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi pelaku pengeboman ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka, ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris, sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data Wawancara (*interview*), Pengamatan (*observation*) dan Data Keperpustakaan. Serta analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana di Kabupaten Flores Timur meliputi upaya represif, preventif dan juga kuratif. Penegakan hukum yang paling banyak dalam bentuk upaya represif.

Kesimpulan dari khasus pemboman ikan di Flores Timur di karenakan adanya Kendala –kendala yang di hadapan dalam penegakan hukum ini meliputi jumlah personil kepolisian yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana.

**Kata Kunci : Penegakan hukum, Nelayan, Bom.**

## **ABSTRACT**

### **Law Enforcement for Fish Bombing Actors in East Flores Regency in Review from In Article 85 Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries**

**By: Agustinus Agi Tukan, Nim: 2017111045**

---

Supervision actions that are rarely carried out by the Larantuka Police directly are due to the fact that the number of Larantuka Police officers until October 2014 totaled 412 people which is not comparable to the population of East Flores Regency of 241,082 people and an area of 5,983.38 km (land area 1,812.85 km and ocean 4170.53 km). the limited number of police officers who enforce the law against the perpetrators of the fish bombing crime, of course greatly affects the effectiveness of this special law enforcement. The formulation of the problem is: (1). How is Law Enforcement for the Fish Bombing Actors in East Flores District, Larantuka District Viewed from Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries?. (2). What are the factors that influence law enforcement for the perpetrators of fish bombing in East Flores District, Larantuka District, in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries?

The purpose of this study is to examine or study Law Enforcement for Fish Bombing Actors in East Flores District, Larantuka District, in terms of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, to find out Law Enforcement for Fish Bombing Actors in East Flores District, Larantuka District, reviewed from Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and to find out the factors that influence law enforcement for perpetrators of fish bombing in East Flores Regency, Larantuka District, in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries.

This type of research is a type of Empirical Law research, while the approach used in this research is a Juridical Sociological approach. Data collection techniques Interview (interview), Observation (observation) and Library Data. As well as qualitative analysis

The results of this study conclude that law enforcement carried out by the criminal justice sub-system in East Flores Regency includes repressive, preventive and curative efforts. Law enforcement is mostly in the form of repressive efforts.

The conclusion of the fishing bombing case in East Flores is due to the constraints faced in enforcing this law including the limited number of police personnel and the lack of facilities and infrastructure.

**Keywords:** Law Enforcement, Fishermen, Bombs.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>              | i    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>         | ii   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>          | iii  |
| <b>MOTTO .....</b>                      | iii  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>             | v    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | vii  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                    | viii |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | ix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....                 | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                | 6    |
| 1.3 Ruang Lingkup Masalah.....          | 6    |
| 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... | 7    |
| 1.5 Metode Penelitian .....             | 8    |
| 1.6 Lokasi Penelitian .....             | 10   |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....         | 10   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | 12   |
| 2.1 Pengertian Penegakan Hukum.....     | 12   |
| 2.2 Efektivitas Penegakan Hukum.....    | 14   |
| 2.3 Pengeboman Ikan.....                | 16   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBOMAN IKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN LARANTUKA DITINJAU DARI UNTANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.....</b> | <b>28</b> |
| 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 28        |
| 3.2 Ketentuan Yang Mengatur Tentang Pelaku Pemboman Ikan.....   | 28        |
| 3.3 Tugas Dan Fungsi Ditpolairud POLDA NTT .....  | 32        |
| 3.4 Tahapan Penegakan Hukum Bidang Perikanan Di Wilayah Flores Timur .....  | 33        |
| 3.5 Sanksi Pidana bagi Pelaku Pemboman Ikan Di Kabupaten Flores Timur yang Terjadi dalam Praktek .....  | 34        |
| 3.6 Dampak kerusakan yang diakibatkan bom ikan .....  | 37        |
| <b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEBOUMAN IKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN LARANTUKA .....</b>  | <b>39</b> |
| 4.1 Faktor Internal .....   | 39        |
| 4.2 Faktor Eksternal.....   | 45        |
| 4.3 Upaya Penanganan Petugas DITPOLAIRUD POLDA NTT dalam Menanggulangi Pelaku Pemboman Ikan Di Kabupaten Flores Timur   | 46        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>52</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 52        |
| 5.2 Saran .....   | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>56</b> |